LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

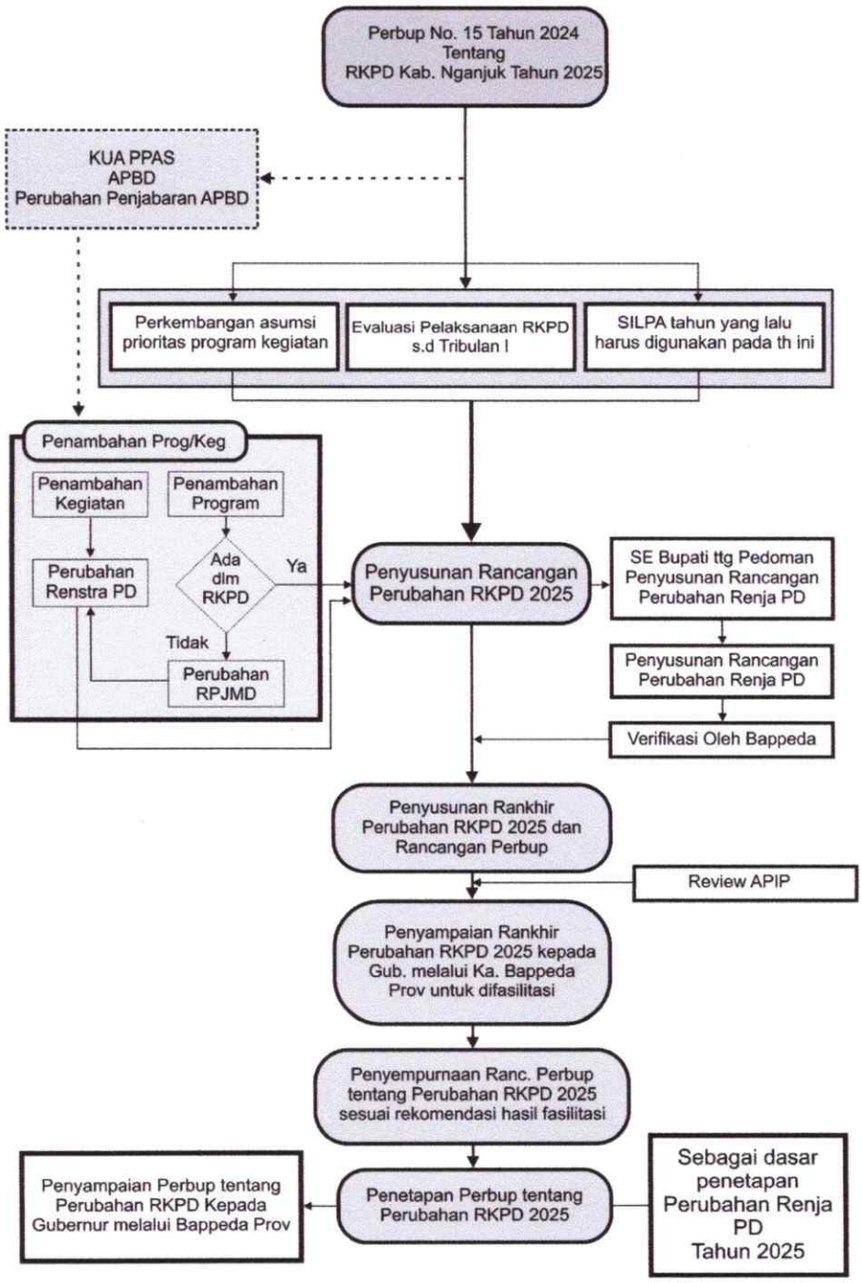
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Nganjuk disusun atas dasar

a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

c. Landasan Operasional :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
24. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tantang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 19);
51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 52 Tahun 2024;
52. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan untuk menyesuaikan dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya selama Tahun 2025

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
2. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025
4. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan I Tahun 2025;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2 Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan I Tahun 2025

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu adanya data dukung berkaitan dengan data dan informasi perencanaan bidang sosial dan permberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada triwulan I Tahun 2025.

Berdasarkan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 Tujuan. Tujuan pertama "**Mengurangi Penduduk Miskin**" mengacu pada urusan sosial dengan indikator **"Persentase Penduduk Miskin Ekstrim".**

Pada evaluasi Renja triwulan I realisasi sebesar 0,46% dan capaian kinerja sebesar 153,33%.

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0,3**	**0,46**	**153,33**
2	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**71,00**	72.46 (Tahun 2023)	**102,05**

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Tujuan **Mengurangi Penduduk Miskin"** memiliki Sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	73	74,39	101,90

Berdasarkan sasaran tersebut diperoleh Data PMKS/PPKS dan Data PSKS per Juni Tahun 2025, sebagai berikut:

Data PMKS/PPKS Per Maret Tahun 2025

Jenis_PMKS	Jumlah_PMKS_yang_Tertangani
Keluarga Fakir Miskin	0
Anak Jalanan	4
Tuna Susila	0
Pengemis	1
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	24
Anak Balita Terlantar	0
Anak Terlantar	0
Anak Berhadapan dengan Hukum	16
Anak dengan Kedisabilitasan :	**0**
a. Tubuh	0
b. Netra	0
c. Cacat Wicara	0
d. Mental	0
e. Cacat Ganda	0
Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	0
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0
Lanjut Usia Terlantar	8
Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	**22**
a. Tubuh	0
b. Netra	0
c. Cacat Wicara	2
d. Mental	20
e. Cacat Ganda	0
f. Penderita Penyakit Kronis	0
Pemulung	0
Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	0
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0
Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	2,440
Korban Penyalah Gunaan Napsa	0
Korban Trafficking	0
Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah	**0**
a. Wanita	0
b. Laki - laki	0
c. Lanjut Usia	0
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
Korban Bencana Alam	32
Korban Bencana Sosial	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
Jumlah	2.547

Data PSKS Per Maret 2025

Jenis_PSKS	Jumlah_PSKS_yang_Aktif	Jumlah_PSKS_yang_Ada
Pekerja Sosial Profesional	4	4
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80	121
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	18	18
Organisasi Sosial	22	27
Karang Taruna	222	301
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20
Jumlah	**366**	**491**

Tujuan kedua **"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"** mengacu pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator **"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)"** pada evaluasi Renja triwulan I realisasi dan capaian kinerja masih menggunakan hasil tahun 2023 berdasarkan sumber data BPS sebesar 72,46 dengan capaian 102,05%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

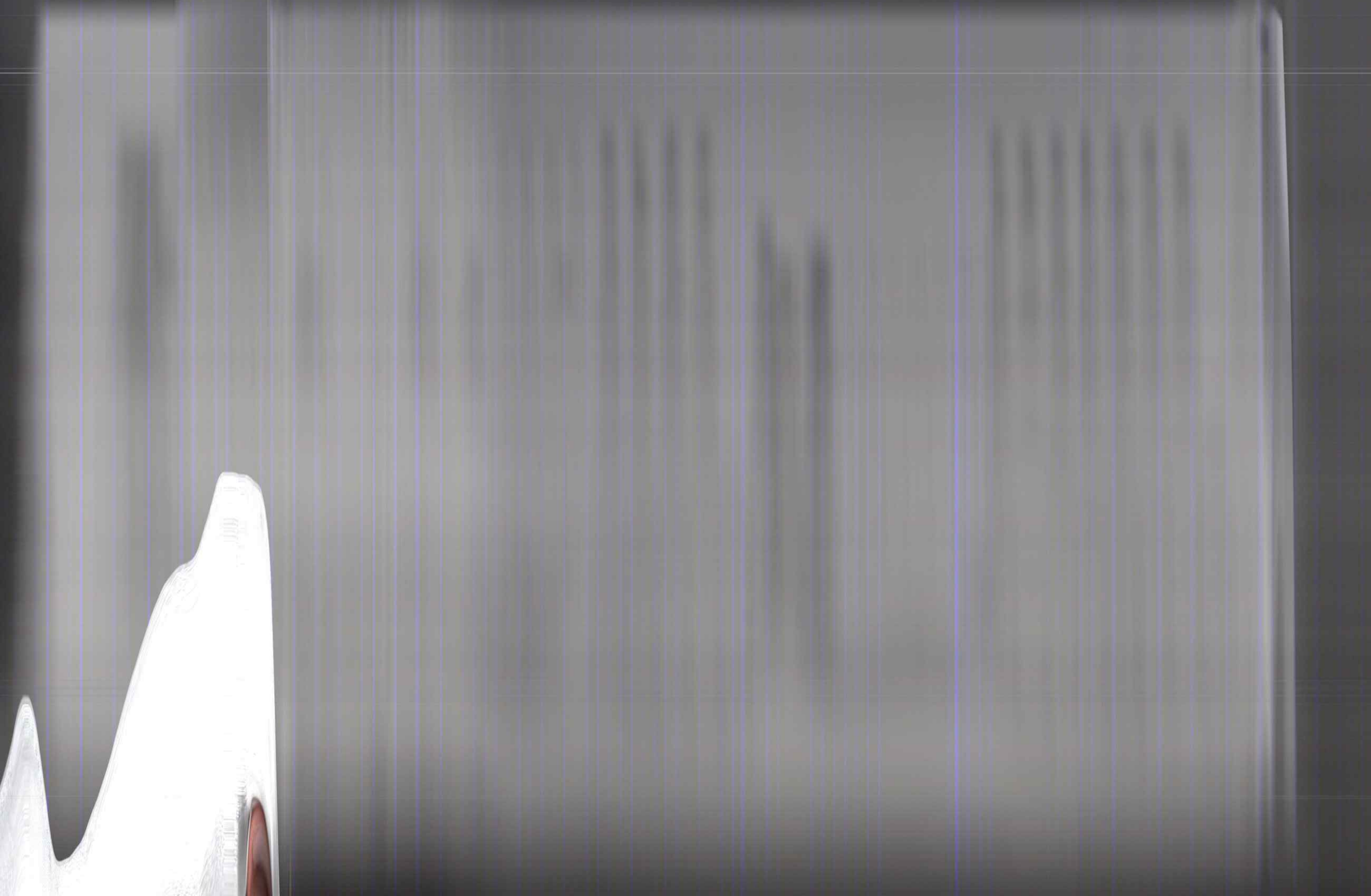
Tujuan **"Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"** memiliki sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	42,26	0	0
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(750) Nindya	0	0

Berdasarkan Sasaran tersebut diperoleh Data Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender, Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya, dan Skor Kabupaten Layak Anak.

Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Per Maret Tahun 2025

Nama Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
BAKESBANGPOL	
B P K A D	
B A P E N D A	B A P E N D A
Sekretariat Daerah	
B K P S D M	
B A P P E D A	
Dinas Komunikasi dan Informatika	
Dinas PUPR	
DISPERINDAG	
Dinas PPKB	Dinas PPKB
DISPORABUDPAR	DISPORABUDPAR
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Satpol PP Kab, Nganjuk	
Dinas PRKPP	
B P B D	
Inspektorat Daerah	
Dinas PM DAN PTSP	
Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
DISPENDUKCAPIL	DISPENDUKCAPIL
Dinas Pendidikan	
Dinas KPP	Dinas KPP
Dinas Pertanian	
Dinas Kesehatan	
Dinas PMD	
Dinas Damkar dan Penyelamatan	Dinas Damkar dan Penyelamatan
Dinas Lingkungan Hidup	
Dinas Perhubungan	
Sekretariat DPRD	
RSD NGANJUK	
RSD KERTOSONO	RSD KERTOSONO
Kecamatan Bagor	
Kecamatan Baron	Kecamatan Baron
Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek
Kecamatan Tanjung	Kecamatan Gondang



Nama Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
Kecamatan Jatikalen	
Kecamatan Kertosono	
Kecamatan Lengkong	
Kecamatan Loceret	
Kecamatan Nganjuk	
Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos
Kecamatan Ngluyu	
Kecamatan Ngronggot	
Kecamatan P a c e	
Kecamatan Patianrowo	
Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon
Kecamatan Rejoso	
Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan
Kecamatan Sukomoro	
Kecamatan Tanjunganom	
Kecamatan Wilangan	
52	**16**

Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi Penyelesaiannya pada Per Maret Tahun 2025 sejumlah 39 Kasus. Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada Per Juni Tahun 2025 :

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Telah Ditangani Per Maret Tahun 2025

Jenis_Tindak_Kekerasan	Jumlah_Kasus_yang_Ditangani
Fisik	0
Psikis	5
Seksual	1
Penelataran	0
Trafficking	0
Lainnya	1
Jumlah	**7**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan pembangunan kabupaten atau kota layak anak didefinisikan sebagai, "Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasiskan hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan evaluasi Internal dan mengkoordinasikan terkait penilaian Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 mendapatkan kategori Madya, sehingga untuk penilaian Tahun 2025 masih dalam tahap evaluasi.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79 Nilai	100 %	77 Nilai	78.35 Nilai	102%	78 Nilai	0.00 Nilai	0.00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	79 %	100 %	77 %	100 %	130%	78 %	63 %	79.11

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lapora n	2 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	100%	4 Lapora n	1 Laporan	8.33
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	100%	4 Lapora n	4 Laporan	33.33
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**79 %**	**98.14 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**56.60 %**	**71.64**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	100%	24 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	26.39
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en	100%	12 Dokum en	3 Dokum en	8.33
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	100%	1 Lapora n	1 Lapora n	33.33

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Lapora n	17 Lapora n	18 Lapora n	18 Lapora n	100%	18 Lapora n	4 Lapora n	7.41
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**79 %**	**100.00 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**67 %**	**84.39**
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0.00
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	33.33
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang					20 Orang	20 Orang	33.33

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**79 %**	**100.00 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**54 %**	**68.57**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	2 Paket	0 Paket	0.00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	8.33
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	16.67
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33.33
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	16.67

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	100%	1 Lapora n	1 Lapora n	33.33
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**79 %**	**100.00 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		36 Unit	36 Unit	100%	1 Unit	0 Unit	0.00
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	46 Unit	46 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	0.00
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**79 %**	**100.00 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**36 %**	**45.71**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lapora n	2 Lapora n	2 Lapora n	2 Lapora n	100%	2 Lapora n	1 Lapora n	16.67
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Lapora n	3 Lapora n	36 Lapora n	36 Lapora n	100%	3 Lapora n	1 Lapora n	11.11

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	100%	12 Lapora n	3 Lapora n	8.33
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**79 %**	**100.00 %**	**77 %**	**100 %**	**130%**	**78 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	27 Unit	31 Unit	31 Unit	100%	30 Unit	0 Unit	0.00
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	50 Unit	0 Unit	0.00
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	51 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	25 Unit	0 Unit	0.00
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	3 Unit	0 Unit	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**85 %**	**100.00 %**	**85 %**	**50 %**	**59%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85 %**	**100.00 %**	**85 %**	**0 %**	**0%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	0 Dokumen	0.00
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85 %**	**100.00 %**	**85 %**	**100 %**	**117%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	300 Orang	75 Orang	100 Orang	80 Orang	80%	100 Orang	0 Orang	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	0 Orang	0.00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	80 Lembaga	72 Lembaga	90%	50 Lembaga	0 Lembaga	0.00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**	**85 %**	**97.88 %**	**85 %**	**70 %**	**82%**	**85 %**	**16 %**	**19.07**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan**	**85 %**	**95.96 %**	**85 %**	**58 %**	**68%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengemis di Luar Panti Sosial	**Layanan Sosial di Luar Panti**								
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	75 Orang	125 Orang	66 Orang	53%	125 Orang	0 Orang	0.00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1290 Orang	268 Orang	420 Orang	351 Orang	84%	430 Orang	0 Orang	0.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 Orang	4032 Orang						
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	1030 Orang	100 Orang	325 Orang	48 Orang	15%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85 %**	**99.80 %**	**85 %**	**82 %**	**97%**	**85 %**	**16 %**	**19.07**
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3401 Orang	2350 Orang	1330 Orang	730 Orang	55%	2000 Orang	500 Orang	14.70
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang	150 Orang	95 Orang	103 Orang	108%	110 Orang	26 Orang	8.00
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	50 Orang	24 Orang	18 Orang	75%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	63 Dokumen	21 Lembaga	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	23 Dokumen	0 Dokumen	0.00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85 %**	**205.86 %**	**85 %**	**100 %**	**117%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85 %**	**205.86 %**	**85 %**	**100 %**	**117%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4966 Orang					1654 Orang	0 Orang	0.00
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	600253 Keluarga	284 Keluarga	214620 Keluarga	214,620 Keluarga	100%	198839 Keluarga	0 Keluarga	0.00
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	15166 Keluarga	2674 Keluarga	8123 Keluarga	7,891 Keluarga	97%	8985 Keluarga	0 Keluarga	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85 %**	**100 %**	**85 %**	**93 %**	**110%**	**85 %**	**32 %**	**37.65**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**85 %**	**100 %**	**85 %**	**86 %**	**102%**	**85 %**	**32 %**	**37.65**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	55 Orang	550 Orang	375 Orang	68%	100 Orang	32 Orang	10.67
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**85 %**		**85 %**	**100 %**	**118%**	**85 %**	**83 %**	**98.04**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang		68 Orang	72 Orang	106%	18 Orang	15 Orang	250.00
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**	**85 %**	**100 %**	**85 %**	**100 %**	**118%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP**	**85 %**	**100 %**	**85 %**	**100 %**	**118%**	**85 %**	**0 %**	**0.00**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1686 Makam	1 Makam	560 Makam	560 Makam	100%	562 Makam	0 Makam	0.00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**105 %**	**105%**	**100 %**	**10 %**	**10.20**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100%			
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	45 Orang					43 Orang	0 Orang	0.00
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	45 Orang					43 Orang	0 Orang	0.00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100 100%**	**100 %**	**100 100%**	**100 %**	**100%**	**100 100%**	**0 %**	**0.00**
2.08.02.2.02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Organisasi	50 Organisasi	65 Organisasi	65 Organisasi	100%			
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**116 %**	**116%**	**100 %**	**10 %**	**10.20**
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	65 Lembaga	50 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	100%	65 Lembaga	0 Lembaga	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi dan Pendampingan								
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3175 Orang	192 Orang	2300 Orang	2,675 Orang	116%	1725 Orang	352 Orang	11.09
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**	**100 %**	**104 %**	**100 %**	**62 %**	**62%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup**	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani**	**100 %**					**100 %**	**0 %**	**0.00**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/ Kota									
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen					5 Dokumen	0 Dokumen	0.00
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100 %**	**109 %**	**100 %**	**25 %**	**25%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1110 Orang	76 Orang	370 Orang	92 Orang	**25%**	370 Orang	0 Orang	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Mendapatkan Layanan Pengaduan								
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Layanan					41 Layanan	0 Layanan	0.00
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.03.2.03.0001	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**82 %**	**82%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98 %**	**98%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	104%			
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%			
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga	20 Lembaga	50 Lembaga	0 Lembaga	0%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	0 Orang	0.00
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98 %**	**98%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi	330 Layanan	30 Layanan	100 Layanan	98 Layanan	98%	110 Layanan	0 Layanan	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Dokumen	52 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	52 Dokumen	0 Dokumen	0.00
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan	24 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**117 %**	**117%**	**100 %**	**17 %**	**16.67**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**117 %**	**117%**	**100 %**	**17 %**	**16.67**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	1 Organisasi		1 Organisasi	2 Organisasi	200%	1 Organisasi	0 Organisasi	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	14 Organisasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33.33
2.08.06.2.02	**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**100 %**					**100 %**	**0 %**	0.00
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0.00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**52.22 %**	**52%**	**100 %**	**7 %**	**7.00**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Memerlukan Perlindungan Khusus								
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**0%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT	30 Orang	30 Perangkat Daerah				150 Orang	0 Orang	0.00
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota			30 Dokumen	0 Dokumen	0%			
2.08.07.2.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0.00

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**100 %**	**100 % .00**	**100 %**	**46.67 %**	**47%**	**100 %**	**7 %**	**7.00**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	50 Orang	30 Orang	59 Orang	197%	50 Orang	7 Orang	12.73
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	105 Orang	150 Layanan	100 Orang	3 Orang	3%	37 Orang	0 Orang	0.00
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**		**100 %**	**110 %**	**110%**	**100 %**	**0 %**	**0.00**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	3 Dokumen	10 Kegiatan	11 Kegiatan	110%			
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP	0 Orang					80 Orang	0 Orang	#DIV/0!
Jumlah							**92%**			

Catatan : Sub Kegiatan Tahun 2024

Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertera di Tabel 2.1. menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sampai dengan Triwulan I sebesar 7% dan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 3,12%.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Triwulan I sangat rendah sesuai dengan kategori pada tabel 2.2. Hal ini dikarenakan penyerapan anggaran yang masih belum maksimal pada Bantuan Sosial Disabilitas, LKSA, Lansia Miskin, dan Siswa Miskin. Selain Bantuan Sosial terdapat Hibah PMI dan WCC, serta adanya penambahan anggaran pada DAK Non Fisik. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencan aksi dan anggaran kas;
2. Melaksanakan kegiatan yang sudah diajukan dan disetujui pada Rankhir Perubahan RKPD dan Rankhir Perubahan APBD;
3. Melaksanakan Pencairan Bantuan Sosial dan Hibah yang direncanakan pada triwulan I.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan rutin masih menyesuaikan kebutuhan, tercapainya nilai SAKIP dari target yang ditentukan	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Pemberdayaan Sosial	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan 2 kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan III	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Rehabilitasi Sosial	19%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Pelayanan yang diberikan serta adanya Bantuan Sosial Disabilitas dan LKSA serta Hibah PMI yang belum terealisasi, dikarenakan pelaksanaan pencairan Bantuan Sosial dan Hibah dilaksanakan pada triwulan II	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang untuk memastikan bantuan sosial dan hibah dapat direalisasikan tepat waktu
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Pelaksanaan kegiatan masih sebatas HR Non ASN, sedangkan untuk kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III, selain itu adanya Bantuan Sosial Siswa Miskin, Lansia Miskin dan DBHCHT yang belum di realisasikan	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Penanganan Bencana	32%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemberian bahan makanan menyesuaikan terjadinya bencana baik sosial maupun alam	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemeliharaan TMP masih dilaksanakan pada triwulan III	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Perlindungan Perempuan	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus perempuan menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan serta belum terealisasikannya Hibah WCC	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penyajian dan Pemanfaat Data Gender dilaksanakan pada triwulan IV	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	17%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
	dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	koordinasi lintas bidang
Program Perlindungan Khusus Anak	7%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus anak menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan	Jika tidak segera dilakukan percepatan realisasi, terdapat risiko tidak tercapainya target kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi dan anggaran kas, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025 TW I	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	-	-	-	0,5%	0,3%	0,1%	10,99%	0,46%	-	4,54%	153,33%	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	70,50	71,00	71,25	70,87 (Tahun 2022)	72,46 (Tahun 2023)	-	100,52%	102,05	-

Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2	Persentase jumlah PSKS yang aktif
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya
5	Skor Kabupaten Layak Anak

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA akan dijabarkan dalam tabel berikut ini

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025 TW I	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
2	Persentase jumlah PSKS yang aktif	-	-	-	72,5%	73%	74%	74,44%	74,54%	-	102,67%	102,10%	-
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	-	-	-	33,33%	42,26%	51,19%	100%	31%	-	300,03	73,35%	-
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
5	Skor Kabupaten Layak Anak	-	-	-	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama	0	-	-	0	0	-

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Sosial			**2024**	**2025**	**2026**	**2024**	**2025 (TW 1)**	**2026**	**2024**	**2025 (TW 1)**	**2026**	
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37,54%	-	100%	37,54%	-	
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39,08%	-	100%	39,08%	-	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,92%	-	100%	36,92%	-	
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45,53%	-	100%	45,53%	-	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23,13%	-	100%	23,13%	-	

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil penelahaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mendapat usulan program/ kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Hasil musrembang Kecamatan.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	2.08.07 PROGRAMPERLINDUNGAN KHUSUSANAK		Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani		
	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Rp.200.000.000,-/ 4 Dokumen	Kegiatan Workshop untuk Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengambil tema ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kesempatan kerja;
4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan kualitas Pendidikan;
6. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah;
8. Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah;
9. Pengembangan Agropolitan dan food estate;
10. Pelestarian Seni Budaya Lokal;
11. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
12. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
13. Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
14. Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada dasarnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 urusan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rankhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam Rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk maka, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 Urusan. Urusan Sosial Berkaitan dengan **"NGANJUK TUMBUH"** sedangkan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan **"NGANJUK SEHAT DAN CERDAS"**, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ahun 2025, yaitu:

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. **Mengurangi Penduduk Miskin**

   Indikator : Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   "Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"

   Indikator : - Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani
   - Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

2. **Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**

   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah :

"Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"

Indikator : - Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
- Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya
- Skor Kabupaten Layak Anak

Target kinerja Dinas Sosial PPPA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Mengurangi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	0,3
Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,00
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100
	Persentase jumlah PSKS yang aktif	73
Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	42,26
	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100
	Skor Kabupaten Layak Anak	(750) Nindya

3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbgai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**23.759.667.794,00**	**16.738.334.397,00**	**24.069.200.357,00**	**310.592.463,00**							**24.797.838.951,56**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.398.667.794,00**	**15.443.536.197,00**	**22.890.986.037,00**	**1.192.318.243,00**							**21.782.612.289,56**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21.398.667.794,00**	**15.443.536.197,00**	**22.890.986.037,00**	**1.192.318.243,00**							**21.782.612.289,56**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**78 Nilai**	**78 Nilai**	**8.904.177.844,00**	**8.742.741.247,00**	**6.062.290.357,00**	**-27.1.539.782,00**							**8.632.638.062,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Pengelenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi*				78 %	78 %	70.000.000,00	70.010.000,00	54.762.000,00	-15.238.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		27.340.726,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	26.962.000,00	-8.038.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			16.884.235,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.010.000,00	25.800.000,00	-9.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.458.491,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun*				78 %	78 %	3.951.390.072,00	3.953.615.249,00	3.940.040.000,00	388.649.928,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		8.319.094.617,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.200.334.072,00	3.203.764.249,00	3.775.587.000,00	575.232.928,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			5.051.341.509,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	331.056.000,00	274.947.000,00	151.359.000,00	-179.697.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			257.925.338,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.480.000,00	5.440.000,00	-4.560.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.913.865,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	8.424.000,00	7.674.000,00	-2.326.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.913.865,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun*				75 %	75 %	11.250.000,00	0,00	0,00	-11.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		11.967.264,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	11.250.000,00	0,00	0,00	-11.250.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			11.967.264,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun*				75 %	75 %	191.150.000,00	166.050.000,00	18.000.000,00	-163.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Karyawan/ Karyawati Dinas Sosial PPPA		125.341.314,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	33.500.000,00	25.000.000,00	0,00	-33.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			50.358.460,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.150.000,00	6.950.000,00	1.000.000,00	-7.150.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			11.967.264,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	124.600.000,00	121.000.000,00	10.460.000,00	-114.050.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			50.388.460,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	13.100.000,00	6.550.000,00	-8.450.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.597.120,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun*				78 %	78 %	432.808.380,00	329.180.000,00	287.044.680,00	-145.763.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		269.713.642,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	126.037.660,00	85.137.810,00	85.137.810,00	-42.899.870,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			13.511.360,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	155.234.100,00	115.035.300,00	100.615.750,00	-54.618.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			131.243.737,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.736.800,00	50.006.950,00	29.332.650,00	-34.403.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			54.505.225,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	-6.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.534.965,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	46.000.000,00	43.110.200,00	-1.889.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			39.799.939,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	24.598.250,00	-5.401.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			26.118.398,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan*				78 %	78 %	2.568.974.267,00	181.675.488,00	246.569.977,00	-2.322.404.290,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		1.700.911.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	304.579.000,00	99.449.400,00	99.449.400,00	-205.129.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			314.928.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	480.395.267,00	82.226.085,00	147.120.577,00	-333.274.690,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			251.942.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.784.000.000,00	0,00	0,00	-1.784.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.133.740.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*				78 %	78 %	857.331.950,00	716.199.350,00	767.902.950,00	-89.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		313.542.317,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.950.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.450.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.077.698,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	157.200.000,00	133.200.000,00	162.000.000,00	4.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			199.538.361,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	695.181.950,00	580.499.350,00	603.402.950,00	-91.779.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			103.926.240,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat*				78 %	78 %	1.231.273.175,00	726.011.100,00	747.970.750,00	-483.302.425,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial PPPA		865.026.962,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	456.350.700,00	300.008.700,00	259.999.550,00	-196.351.150,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			346.833.872,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	23.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			166.956.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	24.500.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-11.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			53.553.845,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	727.422.475,00	401.002.400,00	462.961.200,00	-264.441.275,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			275.662.405,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**				**85 %**	**85 %**	**436.989.080,00**	**414.630.980,00**	**349.144.100,00**	**-68.776.823,00**							**378.223.377,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				85 %	85 %	30.000.000,00	17.927.300,00	8.948.600,00	-21.051.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perbankan, OPD, Swasta,ah Toko dan LSM		29.579.962,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	17.927.300,00	8.948.600,00	-21.051.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			29.579.962,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota*				85 %	85 %	405.000.000,00	396.703.550,00	331.195.500,00	-73.804.500,00			Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	TKSK, PSM, Karang taruna, LKS/ LKSA		346.643.425,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-	100 Orang	0,00	16.768.000,00	8.739.800,00	8.739.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			16.768.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	385.695.250,00	314.205.900,00	-35.794.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			303.582.606,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Lembaga	50 Lembaga	30.000.000,00	15.242.300,00	8.249.800,00	-21.750.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			25.994.817,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**				**85 %**	**85 %**	**2.907.162.660,60**	**2.073.790.260,00**	**2.123.876.960,00**	**-783.337.491,00**							**2.123.926.159,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti*				85 %	85 %	1.269.403.050,00	724.000.000,00	555.199.800,00	-714.203.250,00			Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	PMKS/PP-05 di Kabupaten Nganjuk		1.627.981.093,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	0 Orang	23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			25.410.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			13.975.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	125 Orang	278.843.050,00	37.500.000,00	29.988.800,00	-248.854.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			86.727.461,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				430 Orang	430 Orang	897.810.000,00	686.500.000,00	525.211.000,00	-372.599.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			973.203.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0 Orang	11.550.000,00	0,00	0,00	-11.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.705.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	0 Orang	11.550.000,00	0,00	0,00	-11.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.705.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengelolaan Kewenangan Kabupaten/Kota				8100 Orang	0 Orang	11.550.000,00	0,00	0,00	-11.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			483.677.612,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.057.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti*				85 %	85 %	1.637.709.800,00	1.349.790.250,00	1.378.877.100,00	-59.082.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	PMKS/PP 43 di Kabupaten Nganjuk		466.264.006,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				260 Orang	0 Orang	17.325.000,00	0,00	0,00	-17.325.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.057.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	3500 Orang	190.234.950,00	185.036.250,00	556.580.300,00	366.345.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			209.258.516,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	0 Orang	27.999.950,00	0,00	0,00	-27.999.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			30.936.219,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Peni Kewenangan Kabupaten/Kota				210 Orang	0 Orang	11.549.700,00	0,00	0,00	-11.549.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.705.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	266.000.000,00	389.752.000,00	354.226.800,00	-1.773.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			86.727.461,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0 Orang	17.325.000,00	0,00	0,00	-17.325.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.057.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	0 Orang	17.325.000,00	0,00	0,00	-17.325.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			19.057.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				23 Dokumen	23 Dokumen	1.100.000.000,00	775.000.000,00	767.870.000,00	-332.130.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			99.894.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**85 %**	**85 %**	**8.693.393.200,00**	**6.699.916.800,00**	**13.632.086.800,00**	**1.545.236.769,00**							**10.238.628.969,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval*				85 %	85 %	8.693.393.200,00	6.699.916.800,00	13.632.086.800,00	4.938.693.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Miskin di Kabupaten Nganjuk		10.238.628.969,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1654 Orang	1654 Orang	8.660.600,00	9.999.500,00	8.747.000,00	-1.913.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			9.528.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.08.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				198839 Keluarga	198839 Keluarga	133.004.700,00	204.762.100,00	168.474.200,00	35.469.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			194.767.449,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.08.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5200 Keluarga	9754 Keluarga	8.501.727.900,00	6.485.156.800,00	13.456.885.600,00	4.955.137.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.021.627.770,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.08.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	0 Orang	50.000.100,00	0,00	0,00	-50.000.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.705.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	**1.08.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**				**85 %**	**85 %**	**383.564.960,00**	**441.085.900,00**	**363.200.060,00**	**-37.863.187,44**							**348.701.762,56**	
	1.08.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial*				85 %	85 %	121.600.000,00	71.953.600,00	67.032.600,00	-54.567.400,00			Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Nganjuk		57.540.262,56	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.08.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	44.999.650,00	71.953.600,00	67.032.600,00	22.032.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi dan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			40.418.762,56	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.08.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			7.260.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	0 Unit	10.000.150,00	0,00	0,00	-10.000.150,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			3.115.710,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	50.000.200,00	0,00	0,00	-50.000.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	9.999.800,00	0,00	0,00	-9.999.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.905.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota*				85 %	85 %	281.964.950,00	369.532.300,00	296.167.450,00	34.202.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa/ Kelurahan yang Rawan Terjadi Bencana		296.161.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kam pung	0 Kampung	11.632.500,00	0,00	0,00	-11.632.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12.795.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	250.332.450,00	389.532.300,00	296.167.450,00	45.835.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			275.365.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**				**85 %**	**85 %**	**75.369.150,00**	**71.369.150,00**	**59.387.850,00**	**-3.874.210,00**							**65.494.940,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP*				85 %	85 %	75.369.150,00	71.369.150,00	59.387.850,00	-15.981.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)		65.494.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				562 Makam	562 Makam	75.369.150,00	71.369.150,00	59.387.850,00	-15.981.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP1 Prov : Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			65.494.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.362.000.006,00**	**1.294.788.200,00**	**1.478.274.220,00**	**-873.725.786,00**							**3.016.326.682,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**2.362.000.006,00**	**1.294.788.200,00**	**1.478.274.220,00**	**-873.726.786,00**							**3.016.326.682,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**				**100 %**	**100 %**	**501.000.000,00**	**406.415.900,00**	**261.696.300,00**	**-111.156.437,00**							**388.844.953,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG*				100 %	100 %	172.500.000,00	66.300.000,00	39.183.800,00	-134.316.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nganjuk		127.263.504,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			8.751.646,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	15.650.000,00	6.822.000,00	-73.178.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			58.587.401,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				43 Orang	43 Orang	40.000.000,00	36.450.000,00	28.756.000,00	-11.244.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			29.962.229,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				43 Orang	43 Orang	27.500.000,00	14.200.000,00	2.605.800,00	-24.894.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			29.962.229,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	54.000.000,00	18.200.000,00	11.500.000,00	-42.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Nganjuk		54.728.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	34.500.000,00	18.200.000,00	11.500.000,00	-23.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			34.728.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Organisasi	0 Organisasi	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*				100 %	100 %	274.500.000,00	321.915.800,00	212.012.500,00	-62.487.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Penyedia Layanan di Kabupaten Nganjuk		207.852.309,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				85 Lembaga	65 Lembaga	19.500.000,00	9.600.000,00	5.460.000,00	-14.050.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			11.547.309,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.09.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1725 Orang	1725 Orang	230.000.000,00	312.415.500,00	308.562.500,00	-23.437.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesetaian, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			46.305.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Layanan Pesrgapan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**				**100 %**	**100 %**	**880.000.000,00**	**208.080.700,00**	**317.463.700,00**	**-13.192.751,00**							**836.807.349,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani*				100 %	100 %	120.000.000,00	50.000.000,00	94.410.000,00	-25.590.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Perempuan Korban Kekerasa n di Kabupaten Nganjuk		116.420.907,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000,00	50.000.000,00	94.410.000,00	-590.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			99.036.832,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				95 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			17.364.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani*				100 %	100 %	350.000.000,00	143.050.700,00	223.043.700,00	-126.956.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Jumlah Layanan Rujukan bag Perempuan Korban Kekerasa n yang Melaksa kan Koordinasi di Kabupaten Nganjuk		354.398.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				370 Orang	370 Orang	150.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			337.034.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	41 Layanan	200.000.000,00	68.050.700,00	158.043.700,00	-41.956.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			17.364.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Pengualan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*				100 %	100 %	80.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-80.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Nganjuk		65.987.717,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			11.576.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				5 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			14.180.906,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			1.157.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			39.072.936,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**				**100 %**	**100 %**	**231.000.000,00**	**164.873.300,00**	**136.379.700,00**	**-8.000.000,00**							**225.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	93.000.000,00	61.691.700,00	49.819.600,00	-43.180.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Masyarakat		94.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	51.000.000,00	61.691.700,00	49.819.600,00	-1.180.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			52.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*				100 %	100 %	83.000.000,00	29.981.500,00	14.379.600,00	-46.620.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Masyarakat		66.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				50 Lembaga	0 Lembaga	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	21.000.000,00	29.981.500,00	14.379.600,00	-6.620.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengisatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak*				100 %	100 %	75.000.000,00	73.350.000,00	72.080.500,00	-2.919.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Masyarakat		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Layanan	110 Layanan	75.000.000,00	73.350.000,00	72.080.500,00	-2.919.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaat Data Gender dan Anak**				**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**14.504.000,00**	**5.828.500,00**	**-64.500.000,00**							**29.200.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*				100 %	100 %	70.000.000,00	14.504.000,00	5.828.500,00	-64.173.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk		29.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				52 Dokumen	52 Dokumen	20.000.000,00	14.504.000,00	5.828.500,00	-14.173.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			15.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			13.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**				**100 %**	**100 %**	**630.000.000,00**	**385.000.000,00**	**195.608.800,00**	**242.885.870,00**							**772.885.870,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA*				100 %	100 %	320.000.000,00	305.000.000,00	195.608.800,00	-124.391.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Nganjuk		313.776.465,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	1 Organisasi	80.000.000,00	30.000.000,00	19.116.750,00	-60.883.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			82.833.518,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	240.000.000,00	275.000.000,00	176.492.050,00	-63.507.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			231.142.977,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*				100 %	100 %	210.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-210.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Kabupaten Nganjuk		459.109.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			57.861.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			173.643.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			140.782.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			86.821.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**				**100 %**	**100 %**	**470.000.000,00**	**145.844.800,00**	**581.409.220,00**	**581.589.000,00**							**1.051.589.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani*				100 %	100 %	80.000.000,00	95.844.800,00	324.706.600,00	244.706.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P4 Kab : Pengambilan Kemiskinan dan Penganggguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anak-Anak yang Menjadi Korban Kekerasan di Kabupaten Nganjuk		424.895.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	150 Orang	0,00	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			52.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				30 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			199.111.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	99.844.800,00	277.308.800,00	247.308.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolog, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			173.843.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak*				100 %	100 %	200.000.000,00	50.000.000,00	167.680.620,00	-32.319.380,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Anak Korban Kekerasa n yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus		316.346.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	32.164.620,00	-67.835.380,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			173.643.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				50 Layanan	37 Layanan	100.000.000,00	0,00	135.516.000,00	35.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidi an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			144.703.125,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	190.000.000,00	0,00	69.020.000,00	-120.980.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		316.346.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				2 Lembaga	0 Lembaga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			57.661.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				2 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			86.821.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	80 Orang	50.000.000,00	0,00	69.020.000,00	19.020.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			57.661.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 5 Prov : Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas P3 Kab : Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Berkarakter			115.702.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	JUMLAH								23.780.987.794,00	16.738.334.397,00	24.069.286.257,00	318.592.463,00							24.797.938.861,86	

Analisis perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Tahun 2025

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan, yaitu sebagaimana berkut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp3.428.237.249,- menjadi Rp3.940.040.000,- bertambah Rp511.802.751,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran dari Rp3.263.764.249,- menjadi Rp3.775.567.000,- bertambah Rp511.802.751,- untuk penambahan pagu pada perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp20.900.000,- menjadi Rp18.000.000,- berkurang Rp2.900.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai mengalami perubahan anggaran dari Rp3.900.000,- menjadi Rp1.000.000,- berkurang Rp2.900.000,- pergeseran pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 279.831.160,- menjadi Rp287.044.660,- bertambah Rp7.213.500,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan anggaran dari Rp4.000.000,- menjadi Rp4.250.000,- bertambah sebesar Rp250.000,- untuk penambahan pagu pada Pembayaran Koran Jawa Pos.
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami perubahan anggaran dari 36.146.700,- menjadi Rp43.110.200,- bertambah sebesar Rp6.963.500,- untuk Belanja Natura dan pakan Natura serta makan minum jamuan tamu.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp181.675.488,- menjadi Rp246.569.977,- bertambah Rp64.894.489,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan anggaran dari Rp82.226.088 menjadi Rp147.120.577,- bertambah sebesar Rp64.894.489,- untuk belanja pengadaan Sound System Ruangan Rapat Kecil, Wirelss Microphone System, dan Printer.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp711.699.350,- menjadi Rp767.902.950,- bertambah Rp56.203.600,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan anggaran dari Rp133.200.000,- menjadi Rp162.000.000,- bertambah Rp28.800.000,- untuk penambahan daya dan tagihan Listrik.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan anggaran dari Rp575.999.350 menjadi Rp603.402.950,- bertambah Rp27.403.600,- untuk pengadaan korden vertikal blind dan alat lantai puzzel matras 40x40.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp726.011.100,- menjadi Rp747.970.750,- bertambah Rp21.959.650,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan anggaran dari Rp300.008.700,- menjadi Rp259.989.550,- berkurang Rp40.019.150,- untuk Pergeseran ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan anggaran dari Rp401.002.400,- menjadi Rp462.981.200,- bertambah Rp61.978.800,- untuk Belanja pemeliharaan bangunan Gedung dan Belanja bahan bangunan dan konstruksi.

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial mengalami perubahan anggaran dari Rp622.627.200,- menjadi Rp555.199.800,- berkurang Rp67.427.400,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat mengalami pengurangan dari Rp592.638.400,- menjadi Rp525.211.000,- berkurang Rp67.427.400,- pergeseran ke Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial mengalami perubahan anggaran dari Rp1.283.082.200,- menjadi Rp1.578.677.100,- bertambah Rp295.594.900,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan mengalami penambahan anggaran dari Rp181.061.250,- menjadi Rp556.580.300,- berkurang Rp375.519.050,- untuk Paket Bahan Makanan TMMD dan PMKS/PPKS.
   - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial mengalami pengurangan anggaran dari Rp334.150.950,- menjadi Rp254.226.800,- berkurang Rp79.924.150,- untuk pengadaan korden vertikal blind, alat lantai puzzel matras 40x40 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penambahan daya dan tagihan Listrik pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan belanja Sound System Ruangan Rapat Kecil, Wirelss Microphone System, dan Printer pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp12.709.075.150,- menjadi Rp12.709.043.150,- berkurang Rp32.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengalami pergeseran sub rekening belanja dengan pagu efisensi sebesar Rp168.494.200 menjadi Rp168.474.200,- berkurang Rp20.000 pergersan dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat menjadi Beban Lembur dan penguraian pagu dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN untuk Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga mengalami pergeseran sub rekening belanja dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ke Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dan perubahan pagu Rp12.533.833.950,- menjadi Rp13.456.865.600 bertambah Rp923.031.650 untuk DBHCHT.

D. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota mengalami Pergeseran pada rincian belanja dengan pagu tetap yaitu Rp296.167.450,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana pergeseran pada rincian belanja sebesar Rp296.167.450,- untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS), Sewa Motel, dan Belanja Perjalanan Dinas.

E. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp194.012.500,- menjadi Rp212.012.500,- bertambah Rp18.000.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp188.562.500,- menjadi Rp206.562.500,- bertambah Rp18.000.000,- penambahan ke untuk belanja pakaian khas daerah.

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp91.910.000,- menjadi Rp94.410.000,- bertambah Rp2.500.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp91.910.000,- menjadi Rp94.410.000,- bertambah Rp2.500.000,- penambahan ke untuk kegiatan Roadshow ke Perguruan Tinggi dan Sosialisasi ke Media.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp10.415.000,- menjadi Rp0,- berkurang Rp10.415.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp10.415.000,- menjadi Rp0,- berkurang Rp10.415.000,- ke sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.500.000,-.

C. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp153.334.050,- menjadi Rp195.608.800,- bertambah Rp42.274.750,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari Rp134.217.300,- menjadi Rp176.492.050,- bertambah Rp42.274.750 untuk Rekrutmen Forpan, Pertemuan Rutin Forpan, Evaluasi Forpan.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari

Rp39.359.750,- menjadi Rp0,- berkurang Rp39.359.750,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp39.359.750,- menjadi Rp0,- berkurang Rp39.359.750,-.

D. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp47.400.000,- menjadi Rp72.308.600,- bertambah Rp5.000.000,- dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota mengalami perubahan anggaran dari Rp72.308.600 menjadi Rp277.308.600 bertambah sebesar Rp205.000.000,- untuk Kegiatan Pertemuan Kepala Sekolah dan Kegiatan Workshop bagi SMA/SMK/MA Sederajat yang diusulkan melalui Pokok Pikiran Dewan.

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2025

Tabel 3.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Penaggung Jawab
1	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2,133,876,900**	
2		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**555,199,800**	
3		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	29,988,800	Dinas Sosial PPPA
4		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	525,211,000	Dinas Sosial PPPA
5				**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**1,578,677,100**	
6				Penyediaan Permakanan	556,580,300	Dinas Sosial PPPA
7				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	254,226,800	Dinas Sosial PPPA
8				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	767,870,000	Dinas Sosial PPPA
9				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**13,632,086,800**	
10				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**13,632,086,800**	
11				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6,747,000	Dinas Sosial PPPA
12				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	168,474,200	Dinas Sosial PPPA

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Penaggung Jawab
13				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13,456,865,600	Dinas Sosial PPPA
14		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**363,200,050**	
15				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**67,032,600**	
16				Penyediaan Makanan	67,032,600	Dinas Sosial PPPA
17				**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/ Kota**	**296,167,450**	
18				Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	296,167,450	Dinas Sosial PPPA
Jumlah Total					**16,129,163,750**	

Untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan belanja hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah (Orang /Lembaga)	Rincian (Rp)	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bantuan Sosial	Penyandang Disabilitas	325	487,500,000	APBD
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1.3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Hibah	PMI	1	400,000,000	APBD
		Bantuan Sosial	LKSA	20	334,500,000	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.5	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial	Lansia Miskin	3.604	6,126,800,000	APBD
		Bantuan Sosial	Siswa Miskin (SMK/SMA/MA)	385	288,750,000	APBD
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	DBHCHT	5.769	6983.031.650	APBD
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Hibah	WCC	1	65,000,000	APBD

Tabel 3.4 Belanja DAK Non Fisik

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Sumber Pendanaan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**148,724,000**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**54,100,000**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik	54,100,000	Dana Alokasi Khusus
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**94,624,000**	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik	94,624,000	Dana Alokasi Khusus
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**251,936,000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**47,400,000**	
3	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	DAK Non Fisik	47,400,000	Dana Alokasi Khusus
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**135,516,000**	
4	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DAK Non Fisik	135,516,000	Dana Alokasi Khusus
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota		**69,020,000**	
5	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//Kota	DAK Non Fisik	69,020,000	Dana Alokasi Khusus

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk

memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001